

Turut Koordinasikan Aksi Pencegahan Korupsi, Kemenko Perekonomian Dukung Strategi Nasional Pencegahan Korupsi



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

HM.4.6/753/SET.M.EKON.3/12/2022

Turut Koordinasikan Aksi Pencegahan Korupsi, Kemenko Perekonomian Dukung Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Jakarta, 20 Desember 2022

Pemerintah terus berkomitmen dan berupaya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan salah satunya melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Stranas PK diharapkan menjadi arah kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh seluruh organisasi pemangku kepentingan di Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga berkomitmen untuk turut serta dalam mendukung strategi tersebut. Saat ini Kemenko Perekonomian mengoordinasikan sejumlah kebijakan khususnya di bidang perekonomian yang berfokus pada upaya pencegahan korupsi atau Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) yakni kebijakan satu peta (*one map policy*), perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, serta tata kelola ekspor dan impor komoditas pangan dan kesehatan.

Terkait dengan Kebijakan Satu Peta, kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian yang terukur sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan serta turut membantu penyelesaian konflik tumpang tindih penguasaan lahan, termasuk izin-izin di atasnya.

“Aksi PK selanjutnya adalah perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, sejalan dengan hasil pertemuan petinggi dalam *event* G20 yaitu transformasi ekonomi berbasis digital. Transformasi digital diharapkan bisa mempersempit peluang terjadinya korupsi, dan Pemerintah terus mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mencakup *e-planning*, *e-procurement*, *e-budgeting*, dan *e-services*,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual pada acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang diselenggarakan oleh Tim Nasional Stranas PK, pada Selasa (20/12).

Menko Airlangga juga mengatakan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengakselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah memberikan hasil yang positif. Global E-Government Development Index Indonesia mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2022 berada di peringkat 77, meningkat dibandingkan tahun 2020 di peringkat 88.

Lebih lanjut, terkait perbaikan integrasi data ekspor dan impor pada komoditas pangan dan kesehatan, diharapkan dapat menyediakan dan memanfaatkan data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional, dan data realisasi impor yang valid, dapat diandalkan, dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis yaitu bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam serta

kesehatan yaitu alat kesehatan dan vaksin sebagai basis pengambilan kebijakan Pemerintah.

“Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Stranas PK, Lembaga National Single Window, dan Kementerian/Lembaga terkait juga membangun Neraca Komoditas berbasis elektronik yang terintegrasi atau SINAS-NK. Data dalam SINAS-NK dapat dijadikan pertimbangan untuk kebijakan ekspor-impor, terutama dalam komoditas yang sudah ditentukan,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga turut mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan berbagai pihak dalam mewujudkan Neraca Komoditas dan SINAS-NK, termasuk Stranas PK yang secara konsisten mengawal dan memberikan masukan konstruktif dalam menempatkan Neraca Komoditas sebagai tools pencegahan korupsi yang efektif di bidang ekspor dan impor. (dlt/fsr)

**Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto**

Website: www.ekon.go.id

Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI

Email: humas@ekon.go.id

LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia